

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pengetahuan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah saat ini menyebabkan tantangan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan di daerah agar lebih transparan dalam membuat suatu laporan keuangan daerah. Pemerintah diwajibkan untuk selalu teliti dalam membuat suatu laporan keuangan agar tidak menimbulkan suatu pertanyaan yang menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap laporan keuangan yang telah di buat. Desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Sedarmayanti(2007:38) dalam Diana sari (2012) menyatakan bahwa Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimengerti transparansi adalah tata kelola pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Transparansi adalah bahwa individu, kelompok, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi

yang tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan

Aliyah dan Nahar (2012). Dalam Indah dkk (2013) menjelaskan Penyajian laporan keuangan dalam suatu daerah atau kota dibuat atas dasar kesepakatan bersama untuk mempermudah dalam pengecekan suatu laporan keuangan dalam suatu daerah, Laporan keuangan dianggap sangat penting karena merupakan suatu elemen dasar. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dalam pengertian dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai aksesibilitas laporan keuangan dalam suatu daerah atau kota dinilai penting karena merupakan suatu sarana untuk mempermudah memperoleh informasi laporan keuangan. Safitri Ratna Amalia (2009) dalam Aliyah dan Nahar (2012) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi (PP. No. 58 tahun 2005). Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar setiap rupiah yang

dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, Haryanto (2007) dalam Rohman (2009) dalam Abdullah (2013). Pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan ditandai dengan hasil laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah (pusat dan daerah) adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengguna laporan keuangan berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara transparan dan akuntabel serta dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi laporan keuangan tersebut. Pemberlakuan PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pengganti PP No 105 tahun 2000 yang mewajibkan penyampaian pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran, Neraca daerah, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan menjadikan pemerintah harus menyajikan secara lengkap laporan keuangan tersebut. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi beberapa pemerintah daerah karena sistem dan pelaporan yang selama ini ada belum kondusif kearah tersebut Halim (2002)

Menurut Rohman Abdullah (2013) menjelaskan bahwa salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat

ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja.

Penelitian terdahulu Badjuri, dkk. (2009), mengatakan bahwa tujuan diberlakukannya PP No.24 tahun 2005 adalah agar laporan keuangan lebih *accountable* dan berkualitas. Dalam Indah dkk(2013), Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik (Sukhemi,2010).Sanondo(2004) dalam Abdullah (2009) meneliti tentang laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai perwujudan akuntabilitas publik. Hasil penelitiannya, antara lain, menyimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban kinerja kepala daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik pemerintah kabupaten/kota.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara kerja pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang di buat apakah sudah transparan dan sesuai dengan anggaran yang sebenarnya juga agar masyarakat agar lebih tangap tentang kinerja pemerintah selama ini. Untuk mengetahui hal itu masyarakat diharapkan lebih peka terhadap hal-hal

yang baru dan berkembang di kalangan pemerintah saat ini juga pemerintah diuntut untuk jujur dalam menyusun suatu laporan keuangan agar masyarakat senantiasa percaya dan mengerti.

Penelitian ini adalah hasil replikasi dari penelitian Aliyah dan Nahar (2012). Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, pada Aliyah dan Nahar (2012) objek penelitian di kabupaten Jepara sedangkan pada penelitian ini di kabupaten Boyolali.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil judul “PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSEBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan ?
2. Apakah aksebilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerahterhadap transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
2. Untuk mengetahui pengaruhaksebilas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagi Pemerintah

Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran mengenai laporan keuangan maupun non keuangan yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah/ kabupaten. Dengan demikian penelitian ini dapat di jadikan evaluasi bagi pemerintah untuk kedepannya.

2. Akademisi dan penelitian selanjutnya

Penelitian ini bisa menjadi literatur dan bahan untuk penelitian berikutnya mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksebilas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten boyolali.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai arahan untuk mempermudah dalam penelitian, maka penulis menyajikan susunan penulisan sebagai berikut ini:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematik penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, penyajian laporan keuangan dan akseibilitas laporan keuangan daerah

BAB III. METODE PENELITIAN

Menguraikan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, pengujian data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V. PENUTUP Menyajikan simpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diperlukan